

Gerakan Transnasional Dan Partisipasi Pengembangan Pendidikan (Studi Kasus Pada Pesantren Salafi Jihadi di NTB)

Abdul Malik

Universitas Islam Negeri Mataram

Email Coresponden*: abdul.malik@uinmataram.ac.id

Abstrak

Pasca era reformasi tahun 1998 varian pesantren mengalami perkembangan yang signifikan, diantara pesantren yang mengalami berkembang adalah pesantren salafi. Seiring terjadi perubahan kondisi masyarakat dan situasi politik nasional pesantren salaf yang bercorak salafi berkembang menjadi tiga type baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan wawasan kebangsaan pada pesantren Salafi Jihadis, yang selama ini diduga berafiliasi pada kelompok gerakan Islam radikal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif terapan (*applied qualitative research*) dengan pendekatan *Interpretive Phenomenology (IP)*. Data-data dianalisis secara kritis berdasarkan hasil wawancara mendalam. Responden sampel survei dipilih secara purposive, yang merupakan narasumber wawancara mendalam dari stakeholders pesantren. Penelitian ini dilakukan pada 2 provinsi: Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren salaf yang bercorak salafi jihadis lebih rentan diinfiltrasi oleh kelompok gerakan Islam "radikal" dengan indikasi bahwa model pesantren tersebut tidak memiliki relasi yang kuat dengan pemerintah, cenderung memandang bahwa pemerintah sebagai thogut dan memandang bahwa aktivitas menghormati bendera merah putih hukumnya haram.

Kata Kunci: Salafi, Jihadis, Radical, Pesantren

PENDAHULUAN

Bicara sistem Pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dua type system Pendidikan yakni system Pendidikan umum dan system Pendidikan Islam. Meskipun system Pendidikan islam pada masa era Sukarno sampai masa akhir era Suharto tidak populis dan bahkan secara politik kebijakan tidak mendapatkan perhatian khusus dari kedua pemerintah tersebut. Kondisi ini sebagai kelanjutan dari warisan kebijakan penjajahan Belanda. Menurut Salik (2018) bahwa *The Islamic school system in the country was marginalized historically by the Dutch colonial administration and remained so in post-independence years by the Sukarno government, following the collapse of the Suharto regime in 1998, however, the number*

of madrasahs (including pesantren) increased nationwide.

Pasca era reformasi, sistem pendidikan islam dengan segala tipologinya mendapatkan kebebasan untuk berkembang. Karena itu sekarang ini, Indonesian menjadi rumah bagi sistem pendidikan islam terbesar di dunia di mana ribuan madrasah melayani kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga muslim (Abubakar dkk, 2020). Salah satu tipe sistem pendidikan islam yang paling tua di Indonesia adalah pesantren salaf. Pesantren pada awalnya dikembangkan oleh dua organisasi Islam terbesar yakni NU dan Muhammadiyah yang berafiliasi pada corak Islam tradisional dan modern, akan tetapi pasca reformasi pesantren mengalami perkembangan tidak hanya dalam hal jumlah, model manajemen

pesantren, tipologi akan tetapi juga ideologi pesantren.

Perkembangan Pesantren tidak lagi berinduk kepada kedua organisasi besar tersebut, di mana pola penetrasi dilakukan melalui jalur jaringan keilmuan yang tersambung sehingga afiliasi pemahaman keagamaan mengikuti pesantren induk. Itu sebabnya pesantren yang masih memegang kuat kultur dan tradisional pesantren cenderung memiliki poros utama yang disebut sebagai kyai (figure) sebagai representasi model pemahaman keagamaan yang diajarkan (Ahmad, 2018). Perkembangan pesantren dewasa ini, tidak lagi berbasis pada figure dan tradisi asli pesantren sebagai mana pada masa-masa awal.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangannya varian pesantren akhir-akhir ini adalah menguatnya keberadaan kelompok-kelompok gerakan islam (Ali, 2017). Baik kelompok gerakan islam yang berafiliasi pada politik praktis seperti PKS (Prosperous Justice Party atau Partai Keadilan Sosial) maupun yang non partisipan seperti organisasi islam the islamic defenders front atau Front Pembela Islam (FPI), Majelis Muslim Indonesia (MMI), and Liberation Party atau Hizbat-Tahrir (Anton, 2018) . Beberapa kelompok ini kemudian disebut sebagai gerakan kelompok revivalisme Islam yakni kelompok yang berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai

islam yang ideal sebagai reaksi terhadap ketidakadilan hukum, social, dan ekonomi . Salah satu jalan yang ditempuh oleh beberapa kelompok gerakan ini di dalam merawat ideologi gerakannya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Keberadaan pesantren yang berafiliasi atau terinfiltrasi oleh beberapa kelompok gerakan islam tersebut dicurigai tidak mengakomodir nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, seperti tidak mengikuti kurikulum pemerintah dan tidak melakukan upacara hormat bendera merah putih.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif terapan (applied qualitative research) dan menggunakan pendekatan Interpretive Phenomenology (IP).

Data dianalisis secara kritis berdasarkan hasil wawancara mendalam. Responden dipilih secara purposive yang merupakan narasumber wawancara mendalam dari stakeholders pesantren. Penelitian ini dilakukan pada 8 provinsi: Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan pendekatan ini penelitian bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengeksplorasi bagaimana Menakar Praktek Wawasan Kebangsaan Pada Pesantren Salafi Jihadis; Studi Atas Kelompok Gerakan Islam di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan

dengan teknik in-depth interview (wawancara mendalam) dan pengamatan. Wawancara mendalam dalam studi ini akan menelusuri pandangan 200 narasumber yang terdiri dari pimpinan pesantren, pengurus pesantren, guru pesantren senior, guru pesantren junior, dan pengurus organisasi santri di 40 pesantren dari 8 provinsi lokasi riset.

Kategori pesantren yang menjadi lokus studi ini dibagi ke dalam 2 kategori besar, yaitu Pesantren Salafiyah dan Pesantren Reformis. Dari 40 pesantren yang akan menjadi lokus penelitian di 8 provinsi didistribusikan ke 20 pesantren salafiyah yang bercorak salafi (50%) dan 20 pesantren reformis (50%). Distribusi narasumber berdasarkan kategori pesantren di setiap provinsi. Pada setiap provinsi lokasi penelitian akan ada 5 pesantren yang menjadi sasaran penelitian dan dari masing-masing pesantren akan diambil 5 narasumber yang akan diwawancarai. Jadi narasumber penelitian ini berjumlah 25 orang setiap provinsi (5 orang setiap pesantren).

Analisis data bertujuan untuk menafsirkan data atau informasi yang diperoleh melalui in-depth interview dan pengamatan serta mengkategorisasi informasi tersebut dengan mengacu kepada tujuan, kerangka konseptual penelitian, dan pertanyaan penelitian sebagai panduan (guidelines). Analisis data pada akhirnya

bertujuan untuk menemukan pola yang sama dan berbeda serta konsep-konsep yang dapat menjelaskan lebih jauh tingkat wawasan kebangsaan pesantren salafi jhadi yang diduga terinfiltrasi oleh kelompok gerakan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kajian ini, kategori Salafi sengaja dibedakan dengan pesantren modernis, meskipun dalam beberapa segi orientasi puritanistiknya memiliki irisan, terutama dengan Muhammadiyah dan Persis. Dalam bentuknya yang konservatif, Salafisme cenderung kontra budaya lokal, dengan komitmen yang kaku pada pemahaman keislaman Salaf al-Shalih di Abad ke-7 Masehi. Merujuk pada pandangan Abubakar dkk (2020) bahwa pada tingkat yang ekstrim, Salafisme menunjukkan radikalisme dalam paham dan sikap politik, meskipun varian lainnya cenderung menolak sikap menentang pemerintah yang sah. Karena itu pesantren salafi dapat dibagi ke dalam 3 corak: 1) Salafi-Puris (tidak berpolitik dan menerima pemerintah selama Muslim); 2) Salafi Haraki (berpolitik dan aktif mengeritik pemerintah atas dasar nilai-nilai Salafis); dan 3) Salafi Jihadi (memandang sudah saatnya untuk berjihad menegakkan sistem Islam menurut ajaran Salafi).

Adapun pesantren yang diinfiltrasi oleh kelompok gerakan islam ini memiliki varian

yang beragam sesuai dengan corak salafi yang ada. Diantaranya Pesantren Umar Bin Khatab (Salafi Jihadi-Bima) NTB, Pesantren Ibnu Mas'ud (Salafi Wahabi) NTB, Pesantren Wahdah Islamiyah (Salafi Haraki) Sulawesi Selatan, Pesantren Ali Bin Abi Tholib (Salafi Wahabi) Jawa Timur, Pesantren Al-Muttaqien Jeparo (Salafi Wahabi) Jawa Tengah, Pesantren Al Hasan Bekasi (Salafi Wahabi) Jawa Barat. Dalam penelitian ini lebih focus pada infiltrasi yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islam yang berafiliasi pada Salafi Jihadis, meskipun akan dieksplorasi beberapa kelompok gerakan islam lain secara singkat sebagai data pembanding (Tahir, 2020).

Berdasarkan informasi di atas, mayoritas pesantren yang berkembang memiliki afiliasi pada kelompok gerakan islam. Semua gerakan yang bernuansa fundamentalis memiliki karakteristik tertentu (Ali, 2017). Kenyataan banyak diantara para ahli seperti Oliver Roy, John L. Esposito, dan Marshall GS Hodgson meyakini bahwa gerakan islam ini adalah bagian dari entitas politik islam yang tidak dipisahkan dari eksistensi Islam sebagai agama. Umumnya gerakan politik islam ini, cenderung dipandang secara pejorative dan prejudice, meskipun kenyataannya di gerakan politik islam memiliki banyak varian (Supriadi dkk, 2020).

Gerakan islam politik umumnya direpresntasikan oleh dua kelompok gerakan

islam, yakni islamic parties dan islamic mass organizations. Kontestasi gerakan organisasi massa islam dengan partai islam ini menjadi factor penyebab yang mempengaruhi orientasi pergerakan islam (Budijanto dan Rahmanto, 2021). Pada awalnya kelompok oraganisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia, hanyalah NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi islam besar ini secara historis dan ideologis memiliki jejak relasi intelektual dengan ulama yang ada di Mecca dan Cairo.

Merujuk pada pandangan Rahman tersebut bahwa perkembangan intelektual islam diwarnai oleh perkembangan intelektual di Timur Tengah. Persentuhan itu dipandang baik karena berdampak positif bagi perkembangan beberapa ideologi kelompok gerakan islam dan lembaga pendidikan islam. Di sisi lain, sejak meluasnya isu radikalisme dan terorisme global pasca 11 september 2002 (Salik, 2019), beberapa organisasi massa islam yang muncul dan menguat belakangan pasca era reformasi 1998, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Salafi, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) juga mewarnai perkembangan lembaga pendidikan islam seperti pesantren dan kelompok kajian islam yang diidentikkan sebagai kelompok islam konservatif.

Corak keislaman yang dikembangkan oleh beberapa organisasi massa islam yang muncul belakangan tersebut dianggap tidak

memiliki akar kuat dengan tradisi keislaman yang sudah berkembang cukup lama karena itu pemahaman agama kelompok tersebut sering dihubungkan dengan gerakan islam transnasional. Gerakan islam transnasional ini dianggap lebih formalistic, militant, and radical. Dalam beberapa hal yang lebih partikular seperti doctrine dan ideology dari kelompok tersebut dikenal mengembangkan doktrin loyalty and disavowal dan condong pada ideology *takfir* or *takfiriyyah* dengan tujuan politik mewujudkan khilafah islamiyah. Asumsi ini kemudian menjadi dasar bagi beberapa penstudi gerakan islam untuk melihat bagaimana organisasi gerakan islam melakukan pengembangan pemahaman islam melalui lembaga pendidikan pesantren (Rahman dkk, 2020). Lebih jauh dari itu, organisasi gerakan islam ini seringkali menjadi indicator untuk menghakimi apakah pesantren kategori radikal, tardisionalis atau moderat (Minardi, 2018).

Pesantren Salafi dan Wawasan Kebangsaan

Pesantren tradisional umumnya lebih banyak berafiliasi pada organisasi Nahdatul Ulama (NU) dengan pola, pesantren membangun pertalian yang sifatnya bergantung pada ketokohan seorang figur organisasi yang disebut kiyai. Tidak hanya itu, pola ini dipresentasikan melalui kemampuan pesantren yang memiliki apa yang disebut sebagai kompetensi *social linking* (Najmudin dan Said,

2020). Suatu kompetensi komunitas pesantren menciptakan keterhubungan dengan pemerintah sekaligus masyarakat, Salah satu cara menakar wawasan kebangsaan suatu pesantren adalah dengan melihat *social linking* yang dimiliki dan dibangun oleh pesantren tersebut (Arafat, 2020). Umumnya, semakin intens dan dekat relasi pesantren dengan pemerintah maka semakin berpotensi pesantren tersebut memiliki wawasan kebangsaan yang baik (Muna, 2021). Seperti yang ditemukan pada pesantren yang berafiliasi pada Muhammadiyah bercorak modernis dan NU bercorak tradisional. Kompetensi *social linking* ini kemudian mendorong kedua pesantren tersebut menjadi lebih inclusive dengan dunia luar terutama dengan pemerintah (Tahir, 2020).

Sementara pesantren bercorak salafi Jihadis yang sejak awal diduga terinfiltrasi oleh gerakan kelompok islam transnasional dan bahkan radikal sama sekali tidak memiliki *social linking* dengan pemerintah. Akibatnya, pesantren model ini memiliki jarak dan bahkan tidak jarang bertolak belakang atau bertentangan dengan pemerintah. Beberapa aktivitas partikular pesantren Salafi Jihadis yang dianggap bertentangan dengan pemerintah misalnya pesantren tersebut adalah tidak mengadakan upacara bendera merah putih karena meyakini bahwa menghormati bendera itu hukumnya haram (Hefni dan

Uyun, 2020). Bahkan pada sikap yang lebih ekstrim pemerintah dianggap *thogut*. Artinya pesantren seperti ini dengan sangat jelas berpotensi tidak memiliki wawasan kebangsaan sama sekali, sebaliknya pesantren jenis ini hanya memiliki atau membangun kompetensi *social bonding* dengan sesama komunitasnya sebagai bentuk rasa keterikatan ideologis.

Wawasan Kebangsaan Sebagai Faktor Pelindung

Salah satu pintu masuk radikalisme dalam pesantren adalah diterimanya eks radikal masuk pesantren sebagai pengajar maupun sekadar tinggal di sekitar lingkungan pesantren. Pesantren Umar bin Khatab adalah salah satu yang memiliki resiko karena pesantren tersebut dikelola oleh eks radikal yang telah menerima hukuman penjara. Beberapa anak-anak muda yang disinyalir radikal tinggal di sekitar pesantren, bergaul baik intens maupun tidak dengan anggota komunitas pesantren. Menurut pengakuan pengelola pesantren ini, pandangan dan sikap politik mereka tidak lagi seradikal sebelumnya. Artinya mereka telah mengalami proses deradikalisasi. Namun, persepsi mereka tentang sistem demokrasi sebagai produk kafir dan harapan penerapan syariat oleh negara walaupun bukan dengan cara revolusioner menunjukkan benih-benih itu masih ada. Kontak yang intens dengan mereka yang

masih bergabung dengan ISIS dan jaringan radikal lainnya meningkatkan faktor resiko. Dengan demikian, data faktual diatas merupakan representasi dari model pemahamana keagamaan yang dimiliki oleh pesantren Salafi Jihadis.

Meskipun demikian, pesantren yang terinfiltrasi oleh kelompok gerakan islam, tidak berarti secara otomatis terpapar radikal, akan tetapi tergantung sejauh mana faktor pelindung dan ketahanan yang dimiliki oleh pesantren tersebut. Diantara faktor pelindung dan ketahanan yang dimaksud adalah tingkat kedekatan pesantren dengan pemerintah dalam pengertian intensitas kerjasama pesantren dengan pemerintah dalam beragam program, kemudian kedekatan dengan masyarakat sekitar, dan melaksanakan kegiatan pendidikan yang bisa memupuk nilai-nilai nasionalisme, seperti upacara bendera, pramuka, cinta alam, dan merayakan hari-hari besar nasional (Nuna, 2021). Bagaimanapun, radikalisme merupakan faktor social yang spektrumnya merentang dari lingkungan makro (global), lingkungan meso (nasional), hingga lingkungan mikro (local). Merujuk pada perspektif ini maka faktor penyebab pesantren bertindak radikal menjadi tidak tunggal. Seperti faktor hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan masyarakat, kondisi ummat Islam, aktivitas pendukung pendidikan, kondisi social, dan ekonomi

menjadi factor-faktor yang membentuk proses radikalisasi (Niaz dkk, 2018).

Infiltrasi kelompok gerakan islam ke dalam pesantren pada dasarnya tidak selalu dapat dikaitkan dengan proses radikalisasi pesantren, akan tetapi proses infiltrasi lebih banyak bersinggungan dengan persoalan reformasi system dan nilai pendidikan Islam yang selama ini telah diajarkan pada system sekolah umum, dinilai tidak banyak memberikan pengaruh pada pembentukan akhlak dan kesalehan anak didik. Bagaimanapun agama dan pendidikan dalam konteks pesantren seperti dua sisi mata uang yang sama dan hidup berdampingan dalam transformasi budaya pada masyarakat muslim. Selain itu, kebangkitan pendidikan islam terutama pesantren yang bercorak salafi pada periode pasca-reformasi dapat juga dilihat sebagai manifestasi perlawanan terhadap dominasi pendidikan sekuler (Salik, 2019). Uraian pada sisi ini sering terlewatkan dalam diskursus perkembangan corak pesantren salafi selama ini.

KESIMPULAN

Rendahnya wawasan kebangsaan yang dimiliki suatu pesantren mengindikasikan kemampuan pesantren dalam membangun *social linking*, yakni suatu kompetensi warga masyarakat menciptakan keterhubungan dengan pemerintah. Dengan demikian, semakin besar kemampuan sebuah komunitas

dalam membangun identitas dirinya, membangun jembatan sosial dengan identitas lain, serta menciptakan keterhubungan dengan lembaga pemerintah, maka semakin kuat ketahanannya terhadap pengaruh radikalisme, esktrémisme dan kekerasan lainnya. Merujuk pada hipotesisi ini maka dapat disimpulkan bahwa pesantren salafi jahadis memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap terpaparnya radikalisme karena itu yang perlu dilakukan berdasarkan kajian ini adalah pemerintah harus membangun ketahanan (*building resilience*) lembaga pendidikan Islam dengan beberapa langkah strategis *pertama*, mengarusutamakan lima pilar kebangsaan secara maksimal pada semua level pendidikan. *Kedua*, mengarusutamakan pemahaman islam Ahlussunnah walJama'ah. Karena itu setidaknya ada empat hal dalam menjalankan pembangunan ketahanan. *Pertama*, mencegah kontak warga pesantren dengan gerakan dan paham radikal, *Kedua*, mendelegitimasi ideologi radikal, *Ketiga*, menghilangkan prasangka kebencian kepada identitas yang berbeda dan keempat, mengatasi isu ketidakadilan terhadap umat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, E. M. (2020). Integrasi Keilmuan di Pesantren dalam Menjawab Problematika Kebangsaan Kekinian. *Prosiding Nasional*, 3, 225-232.
- Abubakar, Irfan, Hemay, Idris, Simun, Junaidi, Malik. *Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme; Social Bonding*,

- Social Bridging, Social Linking. Pen. CSRC. Jakarta: 2020
- Ahmad Darmadji, 'Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia', *Millah*, 11.1 (2018),.
- Ali Maksum, 'Discourses on Islam and Democracy in Indonesia: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *Journal of Indonesian Islam*, 11.2 (2017), 405–22.
- Anton Minardi, 'The New Islamic Revivalism in Indonesia Accommodationist and Confrontationist', *Journal of Indonesian Islam*, 12.2 (2018), 247–64
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57.
- Hefni, W., & Uyun, Q. (2020). Pendampingan Kader Pesantren Sebagai Aset Modal Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(2), 175.
- Muna, N. N. (2021). Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Syi'ir Lokal di Pesantren Salafiyah Kapurejo Pagu Kabupaten Kediri. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 7(2), 70-86.
- Najmudin, N., & Said, S. (2020). Penanaman Nilai Moderasi Islam Dan Wawasan Kebangsaan Pada Santri Pondok Pesantren Salafi Jami'atul Ikhwan Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 6(1).
- Niaz Asadullah and Maliki, 'Madrasah for Girls and Private School for Boys? The Determinants of School Type Choice in Rural and Urban Indonesia', *International Journal of Educational Development*, 62.November 2017 (2018), 96–111.
- Rahman, A. B. D. U. L., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 15(1), 69.
- Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarto, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 53-72.
- Salik. M. Conserving moderate Islam in Indonesia: An analysis of Muwafiq's speech on online media. *Journal of Indonesian Islam*. (2019).. vol 13. nomor 2. halaman 373-394
- Tahir, I., & Tahir, I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 74-83.